

PERAN PEREMPUAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Leida Pontoh¹, J. H. Goni¹, Ruindungan¹, Johni Lumolos¹

¹Program Pasaca Sarjana, Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perempuan pegawai negeri sipil dalam pemerintah daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan kondisi empirik pemberdayaan peran perempuan pns di kabupaten bolaang mongondow utara. data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, focus group discussion. data primer diperoleh dari 25 informan pejabat perempuan yang berperan dalam pengambilan keputusan, dan data sekunder berupa dokumen tertulis dari instansi pemerintahan daerah kabupaten bolaang mongondow utara dan studi kepustakaan. teknik analisis yang digunakan lebih menekankan pada analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran atau keterwakilan perempuan pns kabupaten bolaang mongondow utara sudah berjalan baik, buktinya penempatan disemua sektor dan optimalisasi dalam jabatan-jabatan strategis baik eselon II III IV di jajaran struktural pemerintah daerah peran perempuan sudah terwakilkan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran perempuan PNS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sudah berjalan baik, dibuktikan jabatan strategis Eselon II.III.IV di jajaran pemerintah daerah 25% peran perempuan sudah terwakilkan. Namun kesetaraan gender masih perlu ditinjau kembali, melihat perbedaan jumlah pns perempuan dan laki-laki di lembaga pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow utara masih di bawah harapan. Faktor yang menjadi kendala perempuan PNS dalam pengambilan kebijakan dan perumusan kebijakan publik ialah faktor internal yang melekat pada pribadi pegawai, kualitas SDM. Disarankan kepada pemerintah daerah perlu untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi peningkatan dan pengembangan kompetensi sdm perempuan pns. Memberikan ruang/peluang bagi kaum perempuan minimal 30% dalam berkreasi dan berinovasi, agar peran perempuan pns dalam administrasi publik di kabupaten bolaang mongondow utara memiliki nilai jual yang tinggi.

Kata Kunci: Peran perempuan, pegawai negeri sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow

PENDAHULUAN

Konsep kesetaraan gender yang digemakan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan mendorong munculnya berbagai isu tentang makna kesetaraan gender bagi kemajuan pembangunan. Salah satunya ialah isu yang memperkaitkan kesetaraan gender dengan penyelenggaraan Negara yang baik, sebuah konsep yang kemudian diberi label *good governance*. Kemajuan ini antara lain didorong keberhasilan dari kegiatan pembangunan yang meletakkan perempuan "di tengah", seperti kegiatan Grameen Bank di Bangladesh. Latar belakang tersebut menggerakkan Bank Dunia untuk melakukan penelitian secara spesifik hendak memperkaitkan kualitas "*good governance*" dengan pembangunan dimana "*gender*" diletakkan sebagai intinya. Hasil penelitian Bank Dunia pada tahun 2000 yang berkaitan dengan gender tersebut mengemukakan kesimpulan bahwa Negara-

negara yang mempunyai derajat kesetaraan gender (*gender equality*) yang tinggi, relative mempunyai tingkat kemajuan kehidupan (atau kemakmuran) yang tinggi pula.

Di dalam salah satu bagian buku tersebut membahas keterkaitan antara kesetaraan gender, kualitas pengelolaan administrasi publik (atau *governance*), dengan kualitas pembangunan berkesimpulan bahwa di Negara-negara yang kualitas kesetaraan gender dalam administrasi publiknya tinggi parallel dengan tingginya kualitas *good governance*, yang ditunjukkan oleh indikator rendahnya tingkat korupsi. Laporan tersebut juga menyimpulkan bahwa ada korelasi antara kualitas (kesetaraan) gender dengan tingkat korupsi. Pertama, karena gender merupakan salah satu ciri masyarakat egaliter dan partisipatoris. Dalam masyarakat seperti ini terdapat yang menjadikan korupsi merupakan kegiatan yang tidak menguntungkan. Jadi kesetaraan gender berbanding terbalik dengan tingkat korupsi.

Kedua, memang ada karakter khas perempuan yang cenderung mengarah kepada pemerintahan yang lebih bersih tatkala mereka berada di dalam lingkungan atau posisi pemerintahan. Buku tersebut mengemukakan dua penyebab yang mendukung kesetaraan gender dalam administrasi publik dengan kualitas governansi yang baik: pertama, karakter yang lebih egaliter dari administrasi yang mampu membangun kualitas kontrol yang tinggi; dan kedua kecenderungan perempuan untuk mendukung kondisi pengelolaan yang bersih. Sebagai akibatnya, kualitas *good governance* yang tinggi mempengaruhi tingginya kualitas pembangunan yang dicapai oleh Negara yang bersangkutan.

Partisipasi perempuan dalam pembangunan juga semakin ditingkatkan yang dulunya semata-mata menjadi “obyek pembangunan” kini mereka diikutsertakan menjadi “subyek pembangunan” keterlibatan perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan menjadi gagasan baru. Menurut Saptari, & Holzner (1996) seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran gender pada masyarakat, pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) dalam pembangunan menjadi sebuah keharusan.

Ini membuktikan perlunya peningkatan kesetaraan gender diantara perempuan dan laki-laki di dalam sektor publik, atau dalam hal ini sektor Negara. Sudibyo (2001) menjelaskan bahwa ada dua bentuk kesetaraan gender dalam pemerintahan yang baik; pertama kebijakan publik yang sensitive gender dan representative perempuan dalam lembaga-lembaga pembuat kebijakan publik tersebut.

Proses pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menuntut komitmen, peran, serta kerja sama yang baik antar pemerintah daerah dengan seluruh SKPD dan masyarakat Bolaang Mongondow Utara, teristimewa peran gender itu sendiri. Permasalahan sekarang dari seluruh SKPD yang ada di kabupaten ini jumlah Pegawai Negeri Sipil khusus perempuan berjumlah 1372 orang, namun hanya 101 orang perempuan PNS yang berperan dalam pengambilan keputusan. Ini menandakan kesetaraan gender di kabupaten ini belum maksimal, hal ini dibuktikan oleh data perempuan PNS yang berperan dalam pengambilan keputusan kurang dari 10%. Pada hal pengarusutamaan gender dalam administrasi publik menjadi tanggung jawab pemerintah. Artinya pemerintah berkewajiban menjamin

terlaksananya pengarusutamaan gender mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan program kegiatan pembangunan sesuai bidang tugas, fungsi serta kewenangan masing-masing. Kurang seimbangnya peran perempuan pegawai negeri sipil dalam eksekutif skpd ini yang mendasari penulis untuk mengadakan penelitian seputar peran perempuan PNS.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan kondisi empirik pemberdayaan peran perempuan pns di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Moleong (2005) menjelaskan bahwa tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Dari fakta empiris tersebut peneliti akan melakukan analisis pustaka yang berkaitan dengan kompetensi peran perempuan pns tersebut. Data yang diperoleh akan dicatat, diolah, dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosiologis untuk mencermati karakteristik sosiologis perempuan di bidang eksekutif dalam pemerintah daerah yang secara cultural yang berbeda dengan daerah lain di kabupaten bolaang mongondow utara.

Pada konteks tertentu juga digunakan pendekatan ilmu pembangunan untuk melihat apakah pemerintahan daerah kabupaten bolaang mongondow utara telah tersebut sesuai dengan tata pelaksanaan pembangunan yang telah diamanatkan dalam undang-undang otonomi daerah. Sebagai bagian dari masyarakat maka peran perempuan merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat diabaikan, sehingga dapat dipahami bahwa apakah nilai peran perempuan pns tersebut memberi pengaruh signifikan terhadap proses pengambilan keputusan (kebijakan publik) dalam pembangunan sehingga melahirkan konsep *government inovative*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pegawai Negeri Sipil Perempuan

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh bahwa dari 1372 pegawai negeri sipil perempuan dan 950 pegawai negeri sipil laki-laki di lingkungan pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow utara, berperan dalam pengambilan keputusan, atau pimpinan unit kerja jabatan eselon II,III,IV. Pimpinan unit

kerja jabatan eselon menurut jenis kelamin perempuan diketahui bahwa, dari 101 pejabat perempuan, 50 orang diantaranya ialah penjabat dan pelaksana tugas. Artinya dari pejabat yang ada hanya 51 pejabat tetap. Berikut berdasarkan

data yang ada di badan kepegawaian daerah dan diklat bahwa jumlah pekerja perempuan dan laki-laki di lembaga pemerintahan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dilihat pada Tabel 1 berikut di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah PNS Perempuan dan Laki-laki di Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 2012

Jabatan Eselon	Jumlah Pegawai Negeri Sipil	
	Perempuan	Laki-Laki
Eselon II	4 Orang	27 Orang
Eselon III	36 Orang	107 Orang
Eselon IV	61 Orang	102 Orang
Jumlah	101 Orang	236 Orang

Sumber: Olahan Data, BKD, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2012.

Peran PNS Perempuan dalam Pembangunan Daerah

Sesuai dengan fokus penelitian bagaimana peran perempuan PNS dalam Pembangunan Daerah:

- Peran atau keterwakilan perempuan PNS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sudah berjalan baik, buktinya penempatan di semua sektor dan optimalisasi dalam jabatan-jabatan strategis baik eselon IIB di jajaran struktural pemerintah daerah peran perempuan sudah terwakilkan. Indikator keterwakilan dan pemberdayaan peran perempuan dalam pengambilan keputusan sudah cukup, karena sudah 25%.
- Rendahnya kualitas kesetaraan gender di Kabupaten ini disebabkan oleh faktor internal, SDM masih kurang, terutama dari segi skill yang belum sesuai tupoksi, faktor pendidikan, sosial budaya, dan yang terutama kurangnya pengalaman dalam berorganisasi.
- Kualitas kesetaraan gender di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih membedakan peran antara laki-laki dan perempuan, 25 informan penelitian sebagian besar 20 informan atau 80% yang menyatakan tidak ada perbedaan, 4 informan menyatakan masih ada perbedaan, dan 1 informan mengatakan tidak nampak perlakuan perbedaan itu. Alasan sebagian besar informan bahwa karena target pemerintah daerah kedepan agar perempuan bisa menduduki posisi seperti pria. Dan struktural jabatan layak untuk dijabat oleh perempuan, walau pada kenyataannya ada yang menyatakan masih ada jabatan yang

kurang pantas untuk dijabat oleh perempuan. Hasil penelitian diperoleh bahwa peran perempuan dalam program dan perumusan kebijakan praktiknya sudah berbasis gender, namun dalam pengambilan keputusan masih di bawah dari harapan.

Hambatan Peran Perempuan PNS Dalam Pengambilan Keputusan

hambatan peran perempuan pns dalam pengambilan keputusan di pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow utara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Secara umum faktor yang menjadi penghambat kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan di pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow utara ialah faktor kemampuan dan kualitas dan kuantitas sdm, khususnya penguasaan secara teknis, pendidikan, dan faktor internal lainnya baik berupa sosial budaya, peluang bagi pns perempuan itu sendiri. sedangkan yang menjadi kendala bagi pns perempuan dalam menduduki jabatan struktural atau proses perumusan kebijakan, secara dominan lebih karena faktor eksternal, tetapi juga masih dipengaruhi oleh faktor internal yang melekat pada diri pegawai itu sendiri.
- Hambatan atas permasalahan yang dihadapi sesuai hasil penelitian, memberikan solusi agar senantiasa motivasi kepada perempuan pns untuk meningkatkan sdm, agar tidak kalah dengan laki-laki, mengoptimalkan persepsi stakeholder tentang pengarusutamaan gender, selanjutnya meningkatkan kualitas sdm kaum

perempuan pns diseluruh aspek untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi peningkatan sdm perempuan pns baik secara formal maupun secara informal, dan memberikan ruang/peluang bagi kaum perempuan minimal 30% dalam berkreasi dan berinovasi. rendahnya keterwakilan pns perempuan dalam pemerintahan daerah kabupaten bolaang mongondow utara ialah, faktor eksternal dan internal, kualitas sdm, kurangnya motivasi pns perempuan, kurangnya pengembangan karier. dukungan dari pihak suami dan kaum laki-laki khususnya dalam wilayah kerja masing-masing.

Peran perempuan pegawai negeri sipil seiring dengan pemekaran daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, upaya kesetaraan gender mulai dioptimalisasikan dalam struktur organisasi pemerintah daerah kabupaten ini, walaupun anggapan sebagian besar masyarakat bahwa peran perempuan hanyalah mengelola rumah tangga dan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama dibanding kaum laki-laki. Namun setelah pergeseran paradigma administrasi publik dengan adanya undang-undang No. 22/1999 tentang otonomi daerah, maka secara perlahan pembangunan perspektif gender mulai dikenali masyarakat dan berjalan dengan baik, artinya kesetaraan gender ini telah diterima di lingkungan sosial dan kebudayaan masyarakat kabupaten bolaang mongondow utara. hal ini dapat dibuktikan dengan 25% pejabat di pemerintah daerah Bolaang Mongondow Utara eselon II eselon IV sekarang ini dijabat oleh perempuan. ini menandakan peran perempuan dalam jajaran jabatan struktural sudah terwakilkan, bahkan ada beberapa SKPD di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini di bawah kepemimpinan kaum perempuan.

Pada umumnya faktor penghambat kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ialah faktor internal seperti kualitas sdm, khususnya penguasaan secara teknis, pendidikan, dan faktor eksternal berupa sosial budaya, peluang bagi pns perempuan untuk dapat menduduki jabatan

struktural atau proses perumusan kebijakan secara dominan.

Sebagaimana hasil penelitian diperoleh berdasarkan pengalaman organisasi informan, 76% menyatakan ada pengalaman organisasi dan 24% menyatakan tidak memiliki pengalaman dalam berorganisasi. sementara pengalaman memimpin atau pernah menjadi pemimpin suatu organisasi, 72 % pernah menjadi pemimpin dan 28% tidak pernah sama sekali. dan terakhir pengalaman informan dalam hal prestasi kerja yang pernah diraih dari 25 informan pejabat perempuan di kabupaten bolaang mongondow utara 36% yang memiliki penghargaan atas prestasi kerja. dan selebihnya 64% tidak samasekali.

KESIMPULAN

Peran perempuan PNS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sudah berjalan baik, dibuktikan penempatan struktural jabatan strategis eselon II.III.IV. di jajaran Pemerintah Daerah 25% peran perempuan sudah terwakilkan. Namun kesetaraan gender masih perlu ditinjau kembali, melihat perbedaan jumlah PNS perempuan dan Laki-laki di lembaga pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih di bawah harapan. Faktor yang menjadi penghambat, kendala perempuan PNS dalam pengambilan kebijakan dan perumusan kebijakan publik ialah masih dipengaruhi oleh faktor internal yang melekat pada pribadi pegawai, kualitas SDM, pendidikan dan faktor eksternal serta dukungan dari pihak suami atau kaum laki-laki, khususnya di wilayah kerja masing-masing

DAFTAR PUSTAKA

- Saptari, Ratna & Holzner, Brigitte, 1996, *Strategi Memperkecil Ketidakadilan Gender*, Kapal Perempuan, Pustaka Utama Graffiti & Karyanamitra, Jakarta.
- Moleong, Lexy, 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sudibyo, Edy, 2001, *Panduan Pelaksanaan Inpres 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta.